

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press,2009).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo 2004).
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, (St. Paul Minnesota, 2004).
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: sinargrafik,2008).
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Mandar Maju. Bandung. 2000).
- M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha,2010).
- Munir Fuady I, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Qadir Hasan, dkk, Terjemahan Nailul Authar: *Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001).
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Bandung: Putra A Bardin,1999).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prenadamedia Group 2018).
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2011).

Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013).

### **Jurnal :**

Ardi Afrizal, Amrizal, Rian Dani, dan Trie Hierdawati, “FENOMENA KELANGKAAN SUPPLY MINYAK GORENG DI INDONESIA TAHUN 2022”, Vol. 10, No. 1, Juni 2022. DOI: 2338-6746/ 2615-3491.

La Ode Yogi Pradana, Danang Purbasetya, dan Aulia Yaritsunal Firdaus, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Minyak Goreng”, Jurnal Lex Suprema, Vol. 4, No. 2, September 2022. ISSN : 2656-6141.

Nur Cahaya, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perbuatan Penimbunan Bahan Kebutuhan Pokok Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Kertha Semaya Vol. 9 No. 4 Tahun 2021. DOI : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i04.p01>

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 )

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan  
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014  
tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit menetapkan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng sawit

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah

### **Website :**

Antara news, “Polda Sulteng tetapkan satu tersangka penimbunan minyak goreng di Palu”, <https://sulteng.antaranews.com/berita/248769/polda-sulteng-tetapan-satu-tersebaka-penimbunan-minyak-goreng-di-palu>, diakses pada 20 May 2023.

Artikel Fimela “Apa itu minyak goreng curah”, <https://www.fimela.com/food/read/5068388/apa-itu-minyak-goreng-curah-simak-perbedaannya-dengan-minyak-lainnya>, diakses pada 7 Mei 2023.

Bisnis.com, “Harga Minyak Goreng Kemasan Naik 73 Persen Setahun Terakhir”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220413/12/1522723/melejit-harga-minyak-goreng-kemasan-naik-73-persen-setahun-terakhir>, diakses pada 22 Juli 2022.

Detik news, “Satgas Pangan Gerebek Gudang Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng di Palu Sulteng”, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-5967279/satgas-pangan-gerebek-gudang-penimbunan-53-ton-minyak-goreng-di-palu-sulteng>, diakses pada 19 May 2023

DSLAW LAW FIRM “Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen.” <https://www.dslawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

Kabarindah.com,” Harga Minyak Goreng di Indonesia Selangit Meskipun Berada di Lumbung Sawit”, <https://kabarindah.com/harga-minyak-goreng-di-indonesia-selangit-meskipun-berada-di-lumbung-sawit/>, diakses pada 21 Juli 2022.

Kotawaringinbarat,” Kenaikan Harga CPO Dunia Picu Kenaikan Harga Minyak Goreng Di Kobar”, <https://diskominfo.kotawaringinbaratkab.go.id/page/detail/kenaikan-harga->

[cpo-dunia-picu-kenaikan-harga-minyak-goreng-di-kobar](#), diakses pada 2 September 2022

Nin Yasmin Lisasih, “Teori Perbuatan Melawan Hukum”, [https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan\\_melawan\\_hukum/](https://ninyasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/), diakses pada 9 Desember 2022.

Oke news, “3 Kasus Penimbunan Minyak Goreng, Mulai dari PT hingga Pedagang Kecil”, <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2>, diakses pada 15 Desember 2022.

Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, “Ekonom Unair Paparkan Penyebab Kelangkaan minyak Goreng di Indonesia”, <https://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/ekonom-unair-paparkan-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-di-indonesia>, diakses 21 Juli 2022.

Tempo.co, “Kasus Penimbunan 53 Ton Minyak Goreng diPalu Naik ke Penyidikan”, <https://nasional.tempo.co/read/1574114/kasus-penimbunan-53-ton-minyak-goreng-di-palu-naik-ke-penyidikan>, diakses pada 15 Desember 2022.

## **Hasil Penelitian :**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Farawangsa Harahap, “KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS AKIBAT HUKUM DARI PENIMBUNAN MINYAK GORENG DI INDONESIA YANG MENYEBABKAN KELANGKAAN”, skripsi, Medan: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2022.

Gasroh Geardani, “Penimbunan Bahan Pokok Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”. Skripsi, Sumenep: Universitas Wiraraja.